

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Demak

Halaman 27

Dana Perimbangan Dikurangi

■ Pemkab Demak Siap Berhemat

DEMAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak bersiap menghemat anggaran pada APBD 2019 menyusul akan adanya pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Belum diketahui secara pasti besarnya pengurangan dana dari APBN untuk Kabupaten Demak. "Kami sudah menerima pemberitahuan akan adanya pengurangan dana perimbangan, hanya saja belum mengetahui nominalnya," kata Wakil Bupati Joko Sutanto, kemarin.

Menurut penuturannya, pengurangan alokasi dana perimbangan dari pusat

ke daerah bukan hanya berlaku untuk Kabupaten Demak, tetapi juga untuk semua kabupaten/kota se-Indonesia. Hal itu berkenaan dengan adanya *gawe nasional* yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang memerlukan dana besar.

Mengantisipasi hal itu, Pemkab Demak akan melakukan *reschedule* ter-

hadap sejumlah program kerja pemerintah yang ada pada rancangan APBD 2019. Sebenarnya, RAPBD 2019 telah disusun dengan menggunakan *e-planing* dan *e-budgeting* pada awal tahun 2018.

"Beberapa program pembangunan seperti pembangunan gedung dan jembatan kemungkinan akan ditunda setahun ke belakang, tentunya dengan mempertimbangkan skala prioritas," ungkapnya.

Joko Sutanto menjelaskan dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah. Di antaranya berupa DAU, DAK serta bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Selama ini dana perimbangan menjadi tumpuan bagi roda pemerintahan daerah, mengingat pendapatan asli daerah tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan. Dari APBD sebesar Rp 1,2 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak saat ini sekitar Rp 270 miliar, selebihnya berasal dari APBN.

Meski akan dilakukan penghematan, dia menegaskan seluruh aparatur pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kinerja dengan sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan publik.

"Penghematan tidak akan mengurangi besaran gaji atau pendapatan ASN, hanya menunda beberapa program pembangunan," tutur Wabup. (H1-61)